



Kepentingan Nasional dan Strategi Kawasan: Analisis Neo-Realis atas Perbedaan Respons Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Malaysia Terhadap Konflik Gaza

Revy Marlina^{1*}, Syarif Iqbal², Mutiara Jasmine³

^{1,2,3}LSPR Institute of Communication and Business, Indonesia

*Korespondensi: revy.m@lspr.edu

Info Artikel

Diterima 04
Juli 2025

Disetujui 27
Juli 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
Kebijakan; Luar
Negeri; Indonesia-
Malaysia; Gaza;
Defensive Realism

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Konflik Gaza yang kembali memanas tidak hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga menjadi ajang untuk menguji konsistensi politik luar negeri negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Kajian ini menyoroti bagaimana kedua negara merumuskan kepentingan nasional serta persepsi ancaman dalam konteks sistem internasional yang penuh dinamika, sekaligus memperlihatkan posisi struktural mereka di kawasan Asia Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana perhitungan struktural dan kepentingan nasional membentuk respons diplomatik Indonesia dan Malaysia terhadap isu Palestina. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan analisis dokumen resmi, pernyataan pemerintah, serta sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan pendekatan multilateral yang legalistik, hati-hati, dan berfokus pada legitimasi hukum internasional. Malaysia justru menampilkan strategi simbolik yang bersifat konfrontatif sebagai wujud solidaritas politik. Empat variabel dalam kerangka defensive realism yaitu posisi struktural, persepsi ancaman, kepentingan nasional, dan kanal kebijakan dapat menjelaskan perbedaan strategi kebijakan luar negeri kedua negara. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam studi hubungan internasional dengan memperkaya pemahaman mengenai perilaku negara berkembang di Asia Tenggara dalam menghadapi isu global yang berkaitan dengan politik, keamanan, dan solidaritas dunia.

Abstract

The renewed escalation of the Gaza conflict has not only emerged as a humanitarian issue but also served as a platform to test the consistency of foreign policies in Muslim-majority countries such as Indonesia and Malaysia. This study emphasizes how both countries formulate their national interests and perceptions of threats within the dynamic context of the international system while also reflecting their structural positions in the Southeast Asian region. The main objective of this research is to understand how structural calculations and national interests shape the diplomatic responses of Indonesia and Malaysia toward the Palestinian issue. The method used is a qualitative case study that relies on the analysis of official documents, government statements, and relevant academic sources. The findings show that Indonesia places greater emphasis on a multilateral, legalistic, and cautious approach that prioritizes the legitimacy of international law. In contrast, Malaysia adopts a symbolic and confrontational strategy as an expression of political solidarity. Four key

variables in the framework of defensive realism, namely structural position, perception of threats, national interests, and policy channels, help explain the differences in foreign policy strategies between the two countries. This research provides a theoretical contribution to the study of international relations by deepening the understanding of how developing states in Southeast Asia respond to global issues related to politics, security, and solidarity within the Muslim world.

1. Pendahuluan

Konflik Gaza kembali menjadi isu global utama setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan menculik ratusan lainnya. Sebagai respons, Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran yang menargetkan infrastruktur sipil dan pemukiman padat penduduk di Gaza. Korban jiwa dari serangan Israel ke Gaza diperkirakan mencapai lebih dari 64.000 jiwa pada pertengahan 2024 (Jamaluddine et al., 2025). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat bahwa lebih dari 80% populasi Gaza terpaksa mengungsi, menciptakan salah satu krisis kemanusiaan paling serius dalam sejarah modern (United Nations For the Coordination of Humanitarian Affairs, 2025). Di tengah tragedi ini, posisi dan respons negara-negara mayoritas Muslim menjadi sorotan utama dalam diplomasi global.

Sejak eskalasi konflik Gaza pada 2023, respons negara-negara mayoritas Muslim sangat beragam. *Turki* menarik duta besar dari Israel dalam upaya protes diplomatik yang tegas. Meskipun Turki menunjukkan dukungan simbolik terhadap Hamas, bantuan militernya tetap terbatas dan bersifat politik, bukan langsung (Aran, 2025). Sedangkan *Iran* mempertahankan dukungan simbolik dan ideologis terhadap Hamas terutama melalui dukungan finansial dan pelatihan militer, sebagaimana dijelaskan dalam analisis perkembangan "*axis of resistance*" dan strategi proksi (Cingöz, 2025). Di sisi berbeda, *Mesir* memainkan peran penting sebagai mediator kemanusiaan lewat pengelolaan jalur Rafah, sambil menghindari retorika anti-Israel yang ekstrem untuk menjaga stabilitas domestik (Razum et al., 2024). Demikian pula, *Yordania* tetap menggunakan pendekatan diplomatis: meski menarik duta besar sebagai simbol protes, negara ini lebih banyak mendorong penyelesaian damai melalui forum-forum multilateral (Shay & Rosen-Koenigsbuch, 2023). Variasi pendekatan ini menegaskan bahwa solidaritas agama bukan satu-satunya faktor pendorong dalam kebijakan luar negeri negara-negara Muslim.

Kondisi serupa juga tampak dalam respons dua negara Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan historis dan ideologis dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Keduanya secara konsisten menyuarakan dukungan bagi solusi dua negara, menolak normalisasi hubungan dengan Israel, dan aktif dalam forum multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (Organisation of Islamic Cooperation/OIC) (Wajid Ali et al., 2025). Meski demikian, pendekatan kebijakan luar negeri antara Indonesia dan Malaysia terhadap konflik Gaza 2023 menunjukkan perbedaan yang tajam.

Malaysia, menampilkan retorika yang tegas dan simbolik, bahkan menyatakan dukungan terhadap Hamas dan mengumumkan pembangunan masjid, rumah sakit, dan sekolah di Gaza sebagai bagian dari diplomasi solidaritas umat Muslim (Musa, 2024). Sementara itu, Indonesia tetap bersikap hati-hati dan legalistik, menekankan

pentingnya penghentian kekerasan, solusi dua negara, dan menyalurkan dukungan melalui platform multilateral seperti PBB dan OIC (Setiawati, 2024).

Perbedaan respons ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa dua negara dengan populasi Muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, serta rekam jejak politik luar negeri yang pro Palestina, mengambil jalur diplomatik yang berbeda. Pendekatan dominan dalam studi Asia Tenggara sering menggunakan lensa konstruktivisme, dengan menekankan pada faktor identitas Islam, norma, dan persepsi elite politik (Ali et al., 2024; Karisma & Rachmawati, 2025; Musa, 2024; Pratama, 2024). Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menjelaskan variasi dalam tingkat keterlibatan, keberanian diplomatik, dan pemilihan kanal aksi. Mengapa Indonesia tetap netral meskipun tekanan publik tinggi, sementara Malaysia secara terbuka mengadopsi pendekatan simbolik. Untuk mengisi celah analitis tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan neo-realisme, yang memandang negara sebagai aktor rasional yang beroperasi dalam sistem internasional yang anarkis, di mana keputusan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh perhitungan struktural, distribusi kekuasaan, dan kepentingan strategis (Mearsheimer, 2001; Waltz, 1979). Dalam perspektif tersebut, divergensi kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia dibaca sebagai hasil kalkulasi atas posisi relatif mereka dalam sistem internasional multipolar, dengan mempertimbangkan hubungan dengan kekuatan besar, terutama terhadap Amerika Serikat dalam hal ini.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menekankan peran struktur internasional dan dinamika kekuatan global dalam memengaruhi perilaku negara, termasuk negara-negara berkembang. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kedua negara, sebagai aktor utama di Asia Tenggara dengan basis identitas Muslim yang kuat, memposisikan diri dalam menghadapi isu Palestina yang sarat dimensi politik, kemanusiaan, dan keamanan. Analisis ini juga menyoroti bagaimana kalkulasi rasional dalam konteks relasi internasional dipadukan dengan faktor domestik untuk menghasilkan respons diplomatik yang berbeda. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan perspektif teoretis bagi studi hubungan internasional kawasan, khususnya dalam memahami variasi kebijakan luar negeri negara-negara berkembang. Melalui kajian terhadap perbedaan posisi struktural internasional, relasi kekuatan, serta pertimbangan strategis domestik, penelitian ini berupaya memperkaya literatur yang membahas perilaku negara dalam sistem global kontemporer. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya relevan bagi kajian akademik, tetapi juga bagi perumusan kebijakan luar negeri praktis di tingkat regional dan internasional, terutama terkait dengan bagaimana negara-negara Asia Tenggara memainkan peran mereka dalam isu-isu global yang menyangkut solidaritas dunia Muslim dan stabilitas politik internasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif untuk menganalisis perbedaan respons kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terhadap konflik Gaza 2023. Studi kualitatif dipilih karena memungkinkan penelusuran mendalam terhadap konteks politik, kalkulasi strategis, serta kerangka berpikir kebijakan yang digunakan oleh masing-masing negara (Creswell, 2013). Dengan kerangka *defensive realism*, penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor struktural dan strategis yang mempengaruhi preferensi diplomasi kedua negara dalam sistem internasional. Data dalam penelitian ini

diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber primer terdiri dari pernyataan resmi pemerintah, siaran pers Kementerian Luar Negeri, pidato kepala negara dan menteri luar negeri, serta dokumen kebijakan luar negeri dari Indonesia dan Malaysia. Selain itu, digunakan pula data dari organisasi internasional seperti PBB, OIC, dan media daring bereputasi untuk melacak peristiwa, respons, dan posisi diplomatik sepanjang periode 2023 hingga 2025. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan analisis institusi riset lembaga think tank.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang relevan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terhadap konflik Gaza 2023. Data primer diperoleh dari pernyataan resmi pemerintah, siaran pers Kementerian Luar Negeri, pidato kepala negara dan menteri luar negeri, serta dokumen kebijakan luar negeri kedua negara yang dirilis sepanjang periode 2023 hingga 2025. Untuk melengkapi data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta pemberitaan media daring bereputasi yang memuat perkembangan peristiwa, respons diplomatik, dan posisi resmi kedua negara. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta analisis institusi riset dan lembaga think tank yang membahas isu kebijakan luar negeri dan konflik internasional. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dengan pendekatan deduktif berdasarkan empat variabel utama dalam kerangka *defensive realism*, yaitu posisi struktural dalam sistem internasional, persepsi ancaman, kepentingan nasional, dan kanal kebijakan luar negeri. Proses pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam konteks politik, kalkulasi strategis, serta pola perbedaan strategi diplomasi Indonesia dan Malaysia dalam merespons konflik Gaza.

Analisis yang digunakan adalah analisis penelitian tematik dengan pendekatan deduktif, di mana data diklasifikasikan berdasarkan empat variabel utama dalam kerangka *defensive realism*, yaitu posisi struktural negara dalam sistem internasional, persepsi terhadap ancaman eksternal, prioritas kepentingan nasional, dan kanal kebijakan luar negeri. Setiap kasus dianalisis secara terpisah terlebih dahulu, kemudian dibandingkan untuk menemukan pola divergensi dan korelasinya dengan kondisi struktural masing-masing negara. Proses interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks domestik, hubungan eksternal, dan tekanan sistemik internasional. Melalui metodologi ini, penelitian ini tidak hanya menjelaskan perbedaan strategi kebijakan luar negeri antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kalkulasi rasional dalam kerangka *defensive realism* dapat menjelaskan perilaku negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam merespons konflik global.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga fokus utama terkait kepentingan nasional dan strategi kawasan dalam menganalisis perbedaan respons kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terhadap konflik Gaza melalui perspektif neo-realis. Pertama, respons kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung menekankan pendekatan multilateral, legalistik, dan berhati-hati dengan mengutamakan

legitimasi hukum internasional serta dukungan forum global. Kedua, respons kebijakan luar negeri Malaysia yang lebih menonjolkan strategi simbolik dan konfrontatif sebagai wujud solidaritas politik dengan Palestina serta upaya memperkuat citra domestik dan regional. Ketiga, komparasi strategis dan kalkulasi rasional yang menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki kesamaan identitas sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, perbedaan posisi struktural internasional, persepsi ancaman, dan prioritas kepentingan nasional menghasilkan variasi strategi diplomasi yang signifikan dalam merespons konflik Gaza.

Respons Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Respons Indonesia terhadap eskalasi konflik Gaza pada Oktober 2023 ditandai oleh pendekatan yang berhati-hati, konsisten dengan prinsip kebijakan luar negeri *bebas dan aktif* yang telah menjadi pijakan historis sejak awal kemerdekaan. Presiden Joko Widodo menyerukan penghentian kekerasan dan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil, sambil menekankan bahwa Indonesia tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-haknya melalui jalur damai dan diplomatik (Al-Fatih, 2025). Pada konteks ini, Indonesia tidak secara eksplisit mendukung salah satu pihak secara militer atau politik, dan memilih untuk menyalurkan dukungan dalam kerangka hukum internasional.

Sikap ini mencerminkan konsistensi ideologis Indonesia dalam memosisikan diri sebagai negara non-blok yang menjunjung tinggi prinsip anti-kolonialisme dan keadilan global. Namun, prinsip tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan luar negeri yang pragmatis dan terukur. Pemerintah Indonesia secara aktif menggunakan kanal multilateral seperti PBB dan OIC untuk menyampaikan sikap resmi, menghindari tindakan yang dapat mengganggu hubungan dengan kekuatan besar atau menciptakan ketegangan baru di kawasan Asia-Pasifik (Setiawati, 2024). Kebijakan Indonesia juga mencerminkan bentuk diplomasi kemanusiaan. Indonesia telah menyalurkan bantuan medis dan logistik kepada rakyat Palestina melalui lembaga kemanusiaan seperti MER-C dan Palang Merah Indonesia. Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang dibangun dengan dukungan masyarakat sipil Indonesia sejak awal 2010-an, tetap menjadi simbol diplomasi moral yang tidak konfrontatif (Ayun et al., 2024). Bantuan-bantuan ini tidak hanya memperkuat posisi moral Indonesia dalam komunitas internasional, tetapi juga menghindarkan Indonesia dari keterlibatan langsung dalam dinamika kekerasan bersenjata di Timur Tengah.

Pendekatan Indonesia juga berkaitan erat dengan kalkulasi strategis dan pertimbangan struktural. Sebagai negara berkembang yang terhubung secara ekonomi dengan banyak negara besar, termasuk AS, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk, Indonesia cenderung berhati-hati dalam bersikap agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan nasionalnya. Dalam kerangka *defensive realism*, respons Indonesia menunjukkan strategi adaptif dari negara yang tidak memiliki kepentingan langsung di kawasan konflik, namun tetap memanfaatkan peluang untuk mempertahankan reputasi internasionalnya (Glaser, 1997; Taliaferro, 2001).

Faktor transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto juga mempengaruhi konsistensi dan kesinambungan respons Indonesia. Meskipun Prabowo dikenal memiliki gaya komunikasi luar negeri yang lebih terbuka dan berani, seperti bergabung dalam BRICS pada Januari 2025 lalu,

yang mana keanggotaan BRICS dapat memperumit hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) (*Assessing Indonesia's Relations with the US After Joining BRICS | FULCRUM*, n.d.). Dalam isu Gaza, ia tetap menekankan pentingnya dua negara dan hukum internasional sebagai dasar penyelesaian. Bahkan, Presiden Prabowo mengusulkan evakuasi warga Palestina yang terluka ke Indonesia untuk dirawat, sebuah pendekatan yang menunjukkan perluasan kapasitas diplomasi kemanusiaan tanpa melanggar prinsip netralitas formal Indonesia (Pandie, 2024). Sementara secara umum publik Indonesia menunjukkan solidaritas kuat terhadap rakyat Palestina, tekanan domestik terhadap pemerintah tidak sebesar di negara seperti Malaysia. Hal ini dapat dijelaskan oleh struktur politik Indonesia yang lebih plural dan sekuler, di mana partai-partai Islam tidak dominan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dukungan moral masyarakat Indonesia disalurkan melalui demonstrasi sipil, penggalangan dana, dan pernyataan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tanpa menimbulkan tekanan institusional yang memaksa pemerintah mengambil langkah diplomatik yang lebih agresif (Karisma & Rachmawati, 2025).

Pendekatan yang moderat ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga reputasi internasionalnya sebagai kekuatan regional yang stabil dan rasional. Indonesia berupaya mempertahankan citra sebagai negara demokrasi Muslim yang cenderung progresif, serta mampu menyeimbangkan antara nilai kemanusiaan, kepentingan nasional, dan komitmen terhadap perdamaian internasional. Dalam sistem internasional yang multipolar dan tidak pasti, posisi tersebut memberi keuntungan reputasional dan meningkatkan kapasitas bagi Indonesia sebagai mitra strategis yang kredibel di kawasan Asia dan dunia Islam.

Respons Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Gaza lebih merepresentasikan strategi rasional dari aktor negara dalam sistem internasional anarkis. Negara bertindak dalam batas kemampuan dan posisinya di struktur global, sambil menjaga nilai dasar konstitusional tentang kemerdekaan dan keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia bukan semata ekspresi moral, tetapi juga hasil dari kalkulasi realistis atas risiko, posisi relatif, dan kanal diplomatik yang paling menguntungkan.

Respons Kebijakan Luar Negeri Malaysia

Malaysia menampilkan respons yang jauh lebih eksplisit dan simbolik terhadap konflik Gaza dibandingkan Indonesia. Sejak awal eskalasi pada Oktober 2023, pemerintah Malaysia secara terbuka menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan mengecam keras tindakan militer Israel. Pernyataan-pernyataan publik dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengandung retorika yang kuat secara ideologis dan religius, menyebut Palestina sebagai “tanah suci yang dirampas” dan menyamakan penderitaan rakyat Gaza dengan bentuk penjajahan modern (Musa, 2024). Pendekatan simbolik ini menjadi bagian integral dari politik luar negeri Malaysia dalam menyikapi isu-isu yang menyentuh identitas umat Islam global. Dalam kerangka *defensive realism*, respons ini mencerminkan kalkulasi strategis dari negara yang memiliki ruang diplomatik lebih bebas akibat posisi struktural yang relatif independen dari kekuatan besar (Glaser, 1997). Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel dan tidak menghadapi tekanan bilateral yang signifikan dari aktor global terkait konflik Gaza. Hal ini memungkinkan Malaysia untuk mengambil posisi yang lebih vokal tanpa harus menanggung beban

risiko reputasional atau ekonomi yang besar. Sikap keras ini juga memperkuat kredibilitas Malaysia di mata negara-negara OIC dan publik Muslim internasional.

Strategi Malaysia juga memanfaatkan elemen domestik sebagai sumber daya kebijakan luar negeri. Partai Islam Se-Malaysia (PAS), yang menjadi bagian penting dalam koalisi pemerintahan, memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik dan menekan pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel. Mobilisasi politik berbasis Islam ini menjadi faktor signifikan dalam kebijakan simbolik Malaysia terhadap konflik Gaza. Demonstrasi besar-besaran, kampanye solidaritas, serta peran aktif lembaga zakat dan badan amal menunjukkan bahwa isu Palestina tidak hanya diposisikan sebagai urusan luar negeri, tetapi juga sebagai alat konsolidasi legitimasi politik domestik (Mikail et al., 2023). Selain retorika, Malaysia juga mengumumkan kebijakan nyata yang bersifat simbolik dan kemanusiaan. Pada awal 2024, pemerintah mengumumkan rencana membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit di Jalur Gaza, yang akan dibiayai melalui kombinasi dana pemerintah, BUMN, dan publik. Kebijakan ini tidak hanya memperlihatkan bentuk solidaritas konkret, tetapi juga memperkuat posisi Malaysia sebagai negara Muslim yang aktif dalam diplomasi moral global (Musa, 2024). Namun, pendekatan ini tidak disalurkan melalui platform multilateral seperti PBB, melainkan secara bilateral dan populistik, menunjukkan pola diplomasi unilateral dengan muatan politik domestik yang tinggi.

Respons Malaysia juga memperlihatkan keberanian diplomatik yang relatif tinggi, jika dibandingkan dengan struktur kekuatan dan kemampuan militernya yang terbatas. Dalam kerangka *defensive realism*, keberanian ini muncul karena persepsi bahwa risiko konfrontasi dengan aktor global seperti AS relatif kecil, mengingat Malaysia bukan mitra strategis utama dalam arsitektur keamanan kawasan (Taliaferro, 2001). Terlebih lagi, walaupun diskusi akademis sering menekankan penggunaan strategi *hedging* oleh Malaysia dalam hubungannya dengan negara-negara besar, AS dan Tiongkok, namun dalam praktiknya para pembuat kebijakan dan pejabat tinggi telah lama berfokus untuk mendapatkan keuntungan terbesar bagi negara dengan menyelaraskan Malaysia dengan kepentingan inti Tiongkok dan Amerika Serikat (IP25033 | *Malaysia's Relations with China and the United States in 2025 - RSIS*, n.d.). Hal ini menandakan bahwa Malaysia tidak hanya menjadikan AS sebagai pertimbangan keamanan nasional dan ambisi ekonominya, namun juga membangun hubungan dengan Cina untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, posisi keras Malaysia dapat dipahami sebagai strategi berbiaya rendah namun bernilai politik tinggi, terutama untuk konsumsi domestik dan pencitraan internasional.

Pendekatan yang sangat simbolik ini menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas jangka panjang dari kebijakan luar negeri Malaysia. Ketergantungan pada retorika dan tindakan simbolik tanpa pelibatan dalam forum multilateral atau proses negosiasi formal berpotensi mengurangi pengaruh Malaysia dalam agenda diplomasi substantif di Timur Tengah. Tidak seperti Indonesia yang lebih aktif di forum-forum seperti PBB dan OIC, Malaysia belum menunjukkan peran yang signifikan dalam mediasi atau inisiatif resolusi konflik, menjadikan diplomasi Malaysia lebih bersifat deklaratif daripada transformatif.

Faktor lain yang mempengaruhi respons Malaysia adalah dinamika identitas nasional yang semakin religius dalam arena politik pasca-2020. Di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, narasi keumatan menjadi bagian penting dari

diplomasi publik, yang memperkuat identifikasi emosional terhadap isu Palestina di kalangan rakyat Malaysia. Ini menjadikan diplomasi Gaza sebagai bagian dari narasi “Malaysia sebagai benteng umat”. Pada hal tersebut, konteks kebijakan luar negeri Malaysia tidak hanya merupakan hasil kalkulasi strategis eksternal, tetapi juga refleksi dari narasi domestik yang sedang dikonsolidasikan secara politik.

Respons Malaysia terhadap konflik Gaza dapat dibaca sebagai manifestasi dari strategi simbolik berlandaskan pada identitas keagamaan, tekanan politik domestik, dan kalkulasi rasional terhadap posisi struktural di sistem internasional. Negara bertindak dalam ruang yang relatif aman dari tekanan eksternal, sekaligus memaksimalkan keuntungan politik domestik dan citra moral global. Melalui kerangka *defensive realism*, strategi ini mencerminkan penggunaan diplomasi konfrontatif yang dikalkulasi secara hati-hati, sesuai dengan kapasitas dan kepentingan nasional jangka pendek.

Komparasi Stratgis dan Kalkulasi Rasional

Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel, respons diplomatik yang mereka tunjukkan terhadap konflik Gaza 2023 memperlihatkan divergensi yang signifikan. Divergensi tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka *defensive realism*, yang menyoroti bagaimana struktur sistem internasional, persepsi ancaman, kepentingan nasional, dan pilihan kanal diplomatik membentuk perilaku negara. Oleh karena itu, perbedaan respons kedua negara tidak dapat hanya dimaknai sebagai ekspresi nilai atau identitas, tetapi sebagai kalkulasi strategis berdasarkan posisi masing-masing dalam sistem internasional.



Pertama, dalam hal posisi struktural internasional, Indonesia memiliki kepentingan yang lebih kompleks dibandingkan Malaysia. Sebagai negara G20 yang memiliki mitra strategis bagi banyak kekuatan besar, Indonesia berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap tekanan diplomatik dan ekonomi dari aktor global. Dengan demikian, Indonesia mengadopsi strategi kebijakan luar negeri yang lebih berhati-hati dan tidak konfrontatif, menjaga kredibilitas sebagai negara moderat di

mata internasional. Sebaliknya, Malaysia, dengan tingkat keterkaitan struktural yang lebih rendah terhadap kekuatan besar, memiliki ruang manuver yang lebih luas bagi Malaysia untuk mengekspresikan posisi politik melalui kebijakan luar negeri yang lebih simbolik dan agresif tanpa konsekuensi besar terhadap hubungan internasionalnya.

Kedua, dari segi persepsi ancaman, Indonesia melihat konflik Gaza sebagai isu yang jauh dari ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Tidak adanya keterlibatan militer atau kedekatan geografis dengan kawasan konflik menjadikan Indonesia memosisikan isu Gaza dalam kerangka solidaritas moral, bukan urgensi strategis. Hal ini berbeda dengan Malaysia, yang meskipun juga tidak menghadapi ancaman langsung, melihat isu Gaza sebagai bagian dari legitimasi politik domestik dan simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, sehingga lebih mudah menggunakan retorika keras sebagai instrumen kebijakan luar negeri.

Ketiga, dalam aspek kepentingan nasional, Indonesia menempatkan stabilitas hubungan internasional, kepemimpinan di lingkungan kawasan, dan kredibilitas global sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pendekatan multilateral, diplomasi institusional, dan aksi kemanusiaan menjadi pilihan rasional. Malaysia, di sisi lain, memprioritaskan dukungan politik domestik, penguatan citra sebagai negara Islam yang vokal, dan konsolidasi partai koalisi dalam isu keumatan. Dengan hal tersebut, menjadikan respons kebijakan luar negerinya sangat terhubung dengan logika dari keadaan politik dalam negeri Malaysia itu sendiri.

Keempat, dari segi kanal kebijakan luar negeri, Indonesia memilih jalur multilateral melalui PBB dan OIC, serta menyalurkan bantuan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang berbasis legitimasi internasional dan kepatuhan terhadap norma global. Malaysia, sebaliknya, lebih menonjolkan diplomasi bilateral-populistik, yang memberi dampak politik langsung dalam negeri Malaysia namun terbatas pengaruhnya dalam arena global.

Komparasi ini menunjukkan bahwa kedua negara mengambil strategi kebijakan luar negeri yang sesuai dengan posisi struktural dan kalkulasi politik masing-masing. Dalam kerangka *defensive realism*, baik Indonesia maupun Malaysia tidak bertindak secara ideologis semata, tetapi berdasarkan kalkulasi dalam struktur sistem internasional yang anarkis. Strategi Indonesia merefleksikan logika stabilisasi dan konsistensi jangka panjang, sedangkan strategi Malaysia menekankan manuver simbolik yang memberikan legitimasi cepat di tingkat domestik. Hal ini juga mencerminkan bahwa dalam struktur sistem internasional yang multipolar dan penuh ketidakpastian, negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia tidak sekadar mengikuti norma solidaritas, melainkan secara aktif memanfaatkan ruang strategis untuk mengamankan posisi mereka. Malaysia menggunakan konflik Gaza untuk memperkuat diplomasi moral yang memperkuat basis domestik, sementara Indonesia menekankan legitimasi prosedural untuk mempertahankan posisi internasionalnya. Dalam logika *defensive realism*, ini menunjukkan bahwa negara kecil dan menengah tidak pasif dalam struktur, tetapi adaptif terhadap insentif dan risiko sistemik yang mereka hadapi.

3.2 Pembahasan

Respons Indonesia terhadap eskalasi konflik Gaza pada Oktober 2023 memperlihatkan pendekatan yang berhati-hati dan konsisten dengan prinsip bebas aktif yang telah menjadi fondasi kebijakan luar negeri sejak kemerdekaan. Presiden

Joko Widodo menyerukan penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, dan menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui jalur damai serta diplomatik. Sikap ini mencerminkan konsistensi ideologis sekaligus pragmatisme diplomatik, karena Indonesia memilih menyalurkan dukungan dalam kerangka hukum internasional dan melalui kanal multilateral seperti PBB dan OKI. Pendekatan tersebut dipadukan dengan diplomasi kemanusiaan berupa bantuan medis, logistik, serta keberadaan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menjadi simbol solidaritas moral tanpa keterlibatan konfrontatif. Strategi ini sejalan dengan kerangka defensive realism, di mana Indonesia menjaga kepentingan nasionalnya dengan meminimalkan risiko ketegangan politik maupun ekonomi dengan kekuatan besar.

Pertimbangan struktural dan kalkulasi strategis juga sangat memengaruhi respons Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan ketergantungan ekonomi yang luas terhadap Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara Teluk, Indonesia mengadopsi strategi adaptif yang rasional untuk melindungi kepentingan nasional. Faktor transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto turut memberi dimensi baru, di mana Prabowo tetap menekankan solusi dua negara dan supremasi hukum internasional, sekaligus memperluas diplomasi kemanusiaan melalui inisiatif evakuasi warga Palestina yang terluka. Meskipun solidaritas publik di dalam negeri sangat kuat, tekanan politik tidak sebesar Malaysia karena struktur politik Indonesia yang lebih plural dan sekuler. Pendekatan yang moderat ini memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim yang progresif, mampu menyeimbangkan nilai kemanusiaan, kepentingan nasional, serta komitmen terhadap perdamaian internasional di tengah sistem global yang multipolar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons kebijakan luar negeri Malaysia terhadap konflik Gaza 2023 bersifat lebih eksplisit, simbolik, dan konfrontatif dibandingkan Indonesia. Sejak awal eskalasi, pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Palestina serta mengecam keras tindakan militer Israel dengan retorika ideologis dan religius yang kuat. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan solidaritas politik, tetapi juga merupakan kalkulasi strategis yang sesuai dengan posisi struktural Malaysia yang relatif bebas dari tekanan kekuatan besar karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam kerangka defensive realism, strategi tersebut memperlihatkan bahwa Malaysia berani mengambil sikap keras karena risikonya dianggap rendah, sementara manfaat reputasional dan politiknya cukup tinggi, terutama di hadapan publik Muslim internasional dan negara-negara anggota OIC. Respons ini juga diperkuat oleh dinamika domestik, di mana partai-partai berbasis Islam dan opini publik memainkan peran penting dalam mendorong pemerintah agar mengambil sikap tegas dan demonstratif.

Malaysia juga menyalurkan dukungannya dalam bentuk kebijakan nyata yang bersifat simbolik dan kemanusiaan, seperti rencana pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit di Gaza pada tahun 2024 yang dibiayai melalui kombinasi dana pemerintah, BUMN, dan publik. Namun, pendekatan Malaysia lebih bersifat unilateral dan populistik, tidak melalui forum multilateral seperti PBB atau OIC, sehingga diplomasi yang dijalankan cenderung deklaratif daripada transformatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Malaysia lebih diarahkan untuk

memperkuat legitimasi politik domestik sekaligus membangun citra internasional sebagai “benteng umat” dalam solidaritas global terhadap Palestina. Dengan demikian, melalui kerangka *defensive realism*, respons Malaysia dapat dipahami sebagai strategi berbiaya rendah namun bernilai politik tinggi, yang merefleksikan kombinasi antara identitas keagamaan, tekanan politik domestik, dan perhitungan rasional dalam sistem internasional.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama menolak normalisasi hubungan dengan Israel serta mendukung perjuangan rakyat Palestina, strategi kebijakan luar negeri yang mereka pilih menunjukkan divergensi yang jelas. Dalam kerangka *defensive realism*, perbedaan tersebut tidak hanya dilihat sebagai ekspresi identitas atau nilai, melainkan sebagai hasil kalkulasi rasional berdasarkan posisi struktural, persepsi ancaman, kepentingan nasional, dan pilihan kanal diplomatik masing-masing negara. Indonesia, sebagai anggota G20 dengan keterkaitan ekonomi dan politik yang luas dengan kekuatan besar, menempuh strategi yang berhati-hati, multilateral, dan legalistik untuk menjaga kredibilitas global sekaligus meminimalkan risiko tekanan diplomatik maupun ekonomi. Malaysia, dengan keterikatan struktural yang lebih rendah, justru memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk mengedepankan kebijakan simbolik dan konfrontatif yang bernilai tinggi bagi legitimasi domestik serta citra moral internasional, tanpa menanggung risiko besar pada relasi globalnya.

Komparasi ini juga menunjukkan bagaimana kedua negara memanfaatkan isu Gaza sesuai dengan kepentingan dan kondisi domestik masing-masing. Indonesia melihat konflik Gaza terutama sebagai isu solidaritas moral dan kemanusiaan, sehingga responsnya difokuskan pada diplomasi institusional melalui PBB dan OIC serta bantuan kemanusiaan yang memperkuat legitimasi internasionalnya. Malaysia, sebaliknya, memosisikan isu Gaza sebagai instrumen konsolidasi politik domestik dan simbol identitas keumatan, yang diwujudkan melalui retorika keras, diplomasi bilateral-populistik, serta kebijakan simbolik seperti rencana pembangunan fasilitas publik di Gaza. Dengan demikian, dalam perspektif *defensive realism*, strategi Indonesia menekankan stabilitas jangka panjang dan reputasi global, sedangkan Malaysia mengutamakan legitimasi cepat di ranah domestik. Keduanya membuktikan bahwa negara berkembang di Asia Tenggara mampu bersikap adaptif dalam sistem internasional yang multipolar dengan mengkombinasikan kalkulasi rasional, identitas politik, dan peluang strategis yang tersedia.

4. Kesimpulan

Perbedaan strategi kebijakan luar negeri Malaysia dan Indonesia terhadap konflik Gaza 2023 dengan menggunakan pendekatan *defensive realism*. Meskipun keduanya merupakan negara mayoritas Muslim dengan sejarah dukungan terhadap Palestina, respons diplomatik yang ditunjukkan sangat berbeda dalam hal retorika, kanal diplomasi, dan orientasi strategis. Indonesia cenderung berhati-hati, legalistik, dan multilateral, sementara Malaysia tampil lebih vokal, simbolik, dan konfrontatif. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan negara terhadap konflik internasional tidak semata didasarkan pada solidaritas normatif, tetapi merupakan hasil kalkulasi terhadap posisi dan kepentingan dalam sistem internasional. Dalam kerangka *defensive realism*, empat variabel utama mampu menjelaskan variasi perilaku kedua negara: posisi struktural dalam sistem internasional, persepsi terhadap ancaman eksternal, prioritas kepentingan nasional, dan pilihan kanal

diplomasi. Indonesia, sebagai negara dengan keterkaitan struktural yang lebih tinggi dengan kekuatan besar, memilih strategi yang menjaga reputasi globalnya dan menghindari konfrontasi langsung. Sebaliknya, Malaysia, dengan struktur eksternal yang lebih longgar, memiliki ruang manuver yang lebih besar untuk mengambil posisi simbolik yang menguntungkan secara politik domestik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Malaysia, tidak bersifat pasif dalam menghadapi dinamika sistem internasional, melainkan adaptif terhadap tekanan dan peluang yang ada. Respons terhadap konflik Gaza bukan hanya refleksi dari nilai atau solidaritas, tetapi strategi rasional yang memperhitungkan risiko, legitimasi, dan dampak struktural. Dalam konteks ini, *defensive realism* tetap relevan untuk memahami kebijakan luar negeri negara-negara berkapasitas menengah dalam menghadapi isu global yang bernuansa ideologis maupun kemanusiaan. Secara konseptual, artikel ini berkontribusi pada literatur hubungan internasional dengan memperluas penerapan *defensive realism* ke dalam studi kebijakan luar negeri negara-negara Muslim Asia Tenggara. Studi ini juga membuka ruang bagi pendekatan hibrida yang menggabungkan struktur sistem internasional dengan dinamika domestik sebagai penentu perilaku negara. Di tengah dunia yang semakin multipolar dan terfragmentasi, kemampuan negara-negara berkembang untuk merancang strategi yang seimbang antara solidaritas moral dan kalkulasi struktural akan menjadi semakin penting dalam membentuk tatanan global masa depan.

Daftar Pustaka

- Al-Fatih, S. (2025). Indonesia's Humanitarian Diplomacy in the Midst of Gaza and Ukraine Crises: Narratives, Challenges, and Soft Power Potentials. *Journal of Political Innovation and Analysis*, 2(1).
- Al-Fatih, S. (2025). Indonesia's Humanitarian Diplomacy in the Midst of Gaza and Ukraine Crises: Narratives, Challenges, and Soft Power Potentials. *Journal of Political Innovation and Analysis*, 2(1).
- Ali, M., Agustian, C., & Sahide, A. (2024). Identity and Foreign Policy: Comparative Studies of Indonesian and Malaysian Foreign Policies in Relation to Israel. *UNISCI Journal*, 22(65), 53–70. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-200>
- Ali, M., Agustian, C., & Sahide, A. (2024). Identity and Foreign Policy: Comparative Studies of Indonesian and Malaysian Foreign Policies in Relation to Israel. *UNISCI Journal*, 22(65), 53–70. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-200>
- Aran, A. (2025). Israeli foreign policy towards Turkey since 2011: From adverse asymmetry to equivalence? *International Politics*, 61(1). <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00654-w>
- Aran, A. (2025). Israeli foreign policy towards Turkey since 2011: From adverse asymmetry to equivalence? *International Politics*, 61(1). <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00654-w>
- Assessing Indonesia's Relations with the US After Joining BRICS | FULCRUM. (n.d.). Retrieved June 26, 2025, from <https://fulcrum.sg/assessing-indonesias-relations-with-the-us-after-joining-brics/>

- Assessing Indonesia's Relations with the US After Joining BRICS | *FULCRUM*. (n.d.). Retrieved June 26, 2025, from <https://fulcrum.sg/assessing-indonesias-relations-with-the-us-after-joining-brics/>
- Ayun, S. Q., Istifarin, A., Hidayatullah, A. D., & Soleh, B. (2024). Indonesia's Diplomatic Actions in the Israel-Palestine Conflict. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Dan Integrity*, 10(2), 329–341. <https://doi.org/10.33172/jp.v10i2.19605>
- Ayun, S. Q., Istifarin, A., Hidayatullah, A. D., & Soleh, B. (2024). Indonesia's Diplomatic Actions in the Israel-Palestine Conflict. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Dan Integrity*, 10(2), 329–341. <https://doi.org/10.33172/jp.v10i2.19605>
- Cingöz, M. (2025). Iran's Palestinian Policy after Hamas' 7 October Attack. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14(2), 862–874. <https://doi.org/10.33206/mjss.1567000>
- Cingöz, M. (2025). Iran's Palestinian Policy after Hamas' 7 October Attack. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14(2), 862–874. <https://doi.org/10.33206/mjss.1567000>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (third edition). SAGE.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (third edition). SAGE.
- Glaser, C. L. (1997). The Security Dilemma Revisited. *World Politics*, 50(1), 171–201. <https://doi.org/10.1017/S0043887100014763>
- Glaser, C. L. (1997). The Security Dilemma Revisited. *World Politics*, 50(1), 171–201. <https://doi.org/10.1017/S0043887100014763>
- Heywood, A. (2011). *Global politics*. Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2011). *Global politics*. Palgrave Macmillan.
- IP25033 | *Malaysia's Relations with China and the United States in 2025 - RSIS*. (n.d.). Retrieved June 25, 2025, from <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip25033-malaysias-relations-with-china-and-the-united-states-in-2025/>
- IP25033 | *Malaysia's Relations with China and the United States in 2025 - RSIS*. (n.d.). Retrieved June 25, 2025, from <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip25033-malaysias-relations-with-china-and-the-united-states-in-2025/>
- Jackson, R. H., Sørensen, G., & Møller, J. (2022). *Introduction to international relations: Theories and approaches* (Eighth edition). Oxford University Press.
- Jackson, R. H., Sørensen, G., & Møller, J. (2022). *Introduction to international relations: Theories and approaches* (Eighth edition). Oxford University Press.
- Jamaluddine, Z., Abukmail, H., Aly, S., Campbell, O. M. R., & Checchi, F. (2025). Traumatic injury mortality in the Gaza Strip from Oct 7, 2023, to June 30, 2024:

- A capture–recapture analysis. *The Lancet*, 405(10477), 469–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)02678-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)02678-3)
- Jamaluddine, Z., Abukmail, H., Aly, S., Campbell, O. M. R., & Checchi, F. (2025). Traumatic injury mortality in the Gaza Strip from Oct 7, 2023, to June 30, 2024: A capture–recapture analysis. *The Lancet*, 405(10477), 469–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)02678-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)02678-3)
- Karisma, G., & Rachmawati, T. (2025). From Politics to Economic Cooperation: Islam as Identity of Foreign Policy in Jokowi Era. *Journal of Islamic World and Politics*, 9(1).
- Karisma, G., & Rachmawati, T. (2025). From Politics to Economic Cooperation: Islam as Identity of Foreign Policy in Jokowi Era. *Journal of Islamic World and Politics*, 9(1).
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of Great Power politics* (1. ed). Norton.
- Mikail, K., Ibrahimian, H., Idi, A., & Hadi, A. (2023). Dynamics of Civil Islam in Identity Politics of Indonesia and Malaysia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 7(2), 189–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.27677>
- Musa, M. F. (2024). *Malaysia's responses to issues pertaining to Palestine*. ISEAS Publishing.
- Pandie, P. (2024). *Indonesia's Gaza Intervention: Prospects and Pitfalls* (No. 01524). Center for Strategic and International Studies.
- Pratama, R. E. (2024). Indonesia's Role In Promoting Peace In The Israelpalestine Conflict Through Multi-Track Diplomacy. *RECHTSVACUUM: JOURNAL OF LEGAL STUDIES*, 1(1).
- Razum, O., Agha, H., Davidovitch, N., McCall, T., & Shapira, S. (2024). Gaza Ceasefire: Improve WASH, Promote Cooperation. *International Journal of Public Health*, 69, 1607412. <https://doi.org/10.3389/ijph.2024.1607412>
- Setiawati, S. M. (2024). The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: Consistent diplomacy or strategic shifts? *Frontiers in Political Science*, 6, 1304108. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304108>
- Shay, S., & Rosen-Koenigsbuch, J. (2023). *Jordan and the War in Gaza*. International Institute for Counter-Terrorism (ICT).
- Taliaferro, J. W. (2001). Security Seeking under Anarchy. *International Security*, 23(3).
- United Nations For the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025, June 18). *Humanitarian Situation Update #297 | Gaza Strip*. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-297-gaza-strip>
- Wajid Ali, Ayesha Alam, & Dr Ghulam Mujtaba Shah. (2025). Assessing the OIC's Role in the Israel-Palestine Conflict: Challenges and Effectiveness. *Social Science Review Archives*, 3(1), 1957–1966. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i1.505>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill.